

TESIS

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN ANAK MENGALAMI LUKA BERAT

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus
Anak/2018/Pn.Kbr)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



**NAMA : MONALISA
NIM : 2020112075**

KOMISI PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H.**
- 2. Dr. ARIA ZURNETTI, S.H., M.Hum.**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2022

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN ANAK MENGALAMI LUKA BERAT**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-
Anak/2018/Pn.Kbr)**

**(Monalisa, 2020112075, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 131
Halaman, 2022)**

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana ataupun anak adalah saksi dari tindak pidana yang terjadi. Anak berhadapan dengan hukum harus dilindungi oleh negara. Proses pemidanaan yang dilakukan terhadap anak harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah pengadilan koto baru dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ditahun 2022 dapat dilihat di informasi penuluruhan perkara Pengadilan Koto Baru terdapat 40 orang dengan kasus yang berbeda anak berhadapan dengan hukum. Di dalam ketentuan sudah dijelaskan dan diatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan proses pemidanaan, akan tetapi kenyataannya masih banyak anak ditempatkan di posisi layaknya orang dewasa, termasuk mengenai proses penerapan pasalnya. Permasalahan di dalam tesis ini adalah (1) Bagaimanakah Penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP Dalam Surat Dakwaan Alternatif I Pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr? (2) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Anak Mengalami Luka Berat Pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr? (3) Bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr Dikaitkan Dengan Teori *Restorative Justice* ? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah putusan dan mengkaitkan nya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa didapatkan kesimpulan (1) Penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif I yang dilakukan jaksa penuntut umum pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr, tidak dapat untuk diterapkan pada pelaku anak, karena sudah ada UU perlindungan anak yang mengaturnya yakni UU Nomor : 35 Tahun 2014 jo UU Nomor : 23 Tahun 2002 (2) Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 5 /Pid- Sus-Anak / 2018/PN.Kbr tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam penerapan hukumannya, dirasakan kurang tepat bagi si korban, dikarenakan ada salah 1 (satu) pelaku anak sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, dan juga dalam proses perkara hukum yang lain, seharusnya itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim di dalam mengadili suatu perkara karena sudah ada unsur pemberatan bagi pelaku anak, (3) Terhadap penerapan putusan pengadilan negeri koto baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr terhadap korban yang mengalami luka berat dalam mewujudkan keadilan berupa *Restorative Justice*, tidak didapatkan oleh korban. Sebab anak sudah meminta pertanggungjawaban untuk pembayaran ganti kerugian, dan keadaan pemulihan akan tetapi tidak menjadi bahan pertimbangan oleh hakim walau sudah dimintakan dalam persidangan oleh pihak korban. Melalui tulisan ini penulis menyarankan hendaknya setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang menyangkut pelakunya adalah anak agar harus mengacu dan paham terhadap UU SPPA, sehingga asas *Lex specialis derogat lex generalis* yang mengatur mengenai anak dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Luka Berat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Perlindungan anak

**BASIC CONSIDERATION OF JUDGES IN MAKING CRIMINAL DECISIONS ON
CRIMINAL ACTS OF MASSAGE THAT CAUSED CHILDREN SERIOUSLY INJURY
(CASE STUDY OF KOTO BARU COURT DECISION NUMBER : 5/PID.SUS-
ANAK/2018/PN.KBR)**

Monalisa, 2020112075, Master of Law, Faculty of Law Andalas University, 131 Pages, 2022)

ABSTRACT

Children in conflict with the law either as perpetrators of crimes, victims of crimes or children who are witnesses of the crimes that occurred. Children in conflict with the law must be protected by the state. The sentencing process against a child must be in accordance with the provisions contained in the Juvenile Criminal Justice System Act. Cases of children dealing with the law in the Koto Baru court area from year to year have experienced a fairly high increase, in 2022 it can be seen in the information on tracing cases at the Koto Baru Court there are 40 people with different cases, children are in conflict with the law. In the provisions, it has been explained and regulated how children who are in conflict with the law are subject to a criminal process, but in reality there are still many children who are placed in positions like adults, including the process of applying the article. The problems in this thesis are (1) How is the application of Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in the Alternative I Indictment on the Decision of the Koto Baru District Court Number: 5/Pid.Sus-anak/2018/Pn.Kbr? (2) What is the basis for the judge's consideration in imposing a crime against the crime of child abuse causing the child to suffer serious injuries in the decision of the Koto Baru District Court Number: 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr? (3) What is the decision of the Koto Baru District Court Number: 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr Associated With The Theory of Restorative Justice? The research method that the author uses is normative juridical, where this type of research is carried out by reviewing and reviewing decisions and linking them to the laws and regulations that apply as positive law in Indonesia. Based on the research that the author has done, it can be concluded that (1) the application of Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in the Alternative I Indictment by the public prosecutor in the Koto Baru District Court Decision Number: 5/Pid.Sus-anak/2018/Pn. Kbr, cannot be applied to child perpetrators, because there is already a child protection law that regulates it, namely Law Number: 35 of 2014 in conjunction with Law Number: 23 of 2002 (2) The basis for the judge's consideration of the decision Number: 5 /Pid-Sus-Child / 2018/PN.Kbr regarding criminal acts of abuse committed by children in the application of their sentences, it is felt that it is not appropriate for the victim, because there is 1 (one) child perpetrator who has committed the same crime, and also in other legal proceedings, it should be taken into consideration by the judge in adjudicating a case because there is already an element of weighting for child perpetrators, (3) Against the application of the new koto district court decision Number: 5/Pid.Sus-Anak/20 18/Pn. Kbr for victims who suffered serious injuries in realizing justice in the form of Restorative Justice, was not obtained by the victim. Because the child has asked for accountability for the payment of compensation, and the state of recovery, however, is not considered by the judge even though it has been asked for in the trial by the victim. Through this paper, the author suggests that every law enforcement officer in carrying out duties concerning the perpetrator is a child so that they must refer to and understand the SPPA Law, so that the principle of Lex specialist derogat lex generalis which regulates children can be implemented properly.

Keywords: Crime of Persecution, Serious Injury, Children in conflict with the law, child protection